

PENERAPAN *E-GOVERNMENT* DI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Firkawati^{1*}, Mappamiring², Nasrul Haq³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study purposed to find out the implementation of e-government in the Regional Research and Development Agency of Pangkep Regency. This study used qualitative descriptive method. The number of informants in this study were 3 people. The data collection techniques used interviews, observations, and documents related to the research. The results of this study showed that the implementation of e-government in the Regional Research and Development Agency of Pangkep Regency was quite good. This was evidenced by the indicators of measuring aspects in realizing e-government, namely software, hardware, human resources, data and information, organizational structure, communication, and attitude of implementers. Whereas in realizing the implementation of e-government at the Regional Research and Development Agency of Pangkep Regency, there were obstacles which result in application-based services that could no longer be run and used temporarily by the community. One of the internal factors was the hosting on the application had expired because there was no update and payment for the extension of application usage. Another external factor was the socialization stage which was still not optimal in delivering information about the presence of the Pangkep R&D application.

Keywords: *e-government, r&d applications*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *e-government* di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep. Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 3 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan *e-government* di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep sudah cukup baik. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan indikator pengukuran aspek-aspek dalam mewujudkan *e-government* yaitu *software, hardware, sumber daya manusia, data dan informasi, struktur organisasi, komunikasi, dan sikap pelaksana* sudah terpenuhi. Bahwa dalam mewujudkan penerapan *e-government* di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep terkendala yang mengakibatkan pelayanan berbasis aplikasi tersebut tidak dapat lagi dijalankan dan digunakan untuk sementara oleh masyarakat. Salah satu faktor internalnya adalah hosting pada aplikasi sudah *expired* karena tidak dilakukan update dan melakukan pembayaran untuk masa perpanjangan penggunaan aplikasi, faktor eksternal lainnya adalah tahap sosialisasi yang masih belum maksimal dalam penyampaian informasi tentang hadirnya aplikasi Litbang Pangkep.

Kata kunci: *e-government, aplikasi litbang*

* firkawati@gmail.com

PENDAHULUAN

Era digital saat ini berkembang kian pesat dalam bidang Teknologi, Informasi, dan Komunikasi dan telah menawarkan solusi bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah. Oleh karena itu pemerintah kabupaten pangkep melahirkan sebuah inovasi baru, yaitu inovasi aplikasi Litbang Pangkep. Aplikasi Litbang Pangkep merupakan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten pangkep dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberi kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi menyampaikan aduan maupun saran. Kehadiran aplikasi Litbang Pangkep ini berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat kabupaten pangkep agar lebih mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan, serta masyarakat juga dapat ikut berpartisipasi di dalamnya untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan public pada semua aspek dengan cara menyampaikan aduan mengenai kurang baik atau baiknya kualitas pelayanan oleh pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep. Aplikasi Litbang Pangkep ini juga dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan

aspirasi atau saran-saran inovasi yang kemudian akan menjadi bahan pertimbangan oleh Balitbangda Pangkep sebagai bahan penelitian. (Litbang Pangkep.com).

Dalam era otonomi daerah istilah *e-government* ini semakin populer, dan sudah banyak provinsi, kabupaten/kota maupun kecamatan di Indonesia yang menerapkan pelayanan berbasis *e-government* dalam urusan lembaga pemerintahan. Daerah yang memiliki wilayah yang cukup luas, sumber daya manusia yang sedikit, dan jumlah penduduk yang banyak sangat dianjurkan untuk mengembangkan *e-government* tersebut. Dengan kondisi geografis yang demikian maka perlu adanya pengembangan teknologi digital dalam mengelolah pemerintahan dan pembangunan yang belum maksimal yang disebabkan sarana dan prasarana yang terbatas, serta transportasi dan komunikasi yang sering menjadi hambatan. Maka dengan hadirnya teknologi digital pemerintah diyakini mampu memaksimalkan pengelolaan pembangunan pemerintahan yang selama ini belum maksimal. Dalam Inpres No 3 tahun 2003 *e-government* adalah sebagai berikut: “*E-government* adalah penyelenggraan pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan

kualitas layanan publik secara efisien, efektif, dan interaktif”.

Secara umum e-government di definisikan sebagai pemerintahan elektronik *digital government, online government dan transformational government* adalah pemanfaatan teknologi oleh pemerintah untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat, urusan bisnis, serta hal lainnya yang bersangkutan dengan pemerintahan. *E-government* dapat di aplikasikan dalam berbagai ranah pemerintahan misalnya pada legislative, yudikatif, eksekutif, maupun administrasi public untuk meningkatkan proses pemerintahan yang baik dan demokratis. Istilah *e-government* adalah istilah yang komprehensif yang kadang-kadang disebut sebagai on-line pemerintah atau pemerintah berbasis internet. Dawes (2002) memberi kita rasa multidimensionalitas ketika dia menyatakan bahwa *e-government* adalah penggunaan teknologi internet untuk mendukung operasi pemerintah, yang melibatkan masyarakat, dan menyediakan layanan pemerintah.

Electronic government adalah sebuah proses system pemerintahan dengan menggunakan ICT (*information, communication, and technology*) sebagai alat untuk mempermudah proses komunikasi dan transaksi pada

masyarakat, lembaga pemerintahan beserta stafnya. Sehingga mencapai efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah pada masyarakat. *E-government* adalah singkatan dari *Electronic Government*, atau disebut juga *E-Gov. Electronic Government* adalah salah satu bentuk atau model sistem pemerintah yang berlandaskan pada kekuatan teknologi digital, dimana semua pekerjaan administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan dan pengendalian sumber daya milik organisasi yang bersangkutan, keuangan, pajak, retribusi, karyawan dan sebagainya dikendalikan dalam satu sistem.

Menurut Indrajit (2006:38), *E-government* merupakan penggunaan teknologi informasi berbasis internet yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan antar masyarakat, dunia pemerintahan, dan pihak yang berkepentingan. *E-government* adalah tentang penyampaian informasi pemerintah dan penyelenggaraan pelayanan secara online melalui internet atau alat digital lainnya. *E-government* didefinisikan sebagai “penggunaan Teknologi Informasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih nyaman, berorientasi pada konsumen,

mengefektifkan biaya, dan secara keseluruhan merupakan cara yang lebih baik dari sebelumnya (Holmes 2000). Sedangkan pendapat lain menurut seorang penulis (Fang, 2002; Seifert and Bonham, 2004) mendefinisikan *e-government* merupakan sebuah cara bagaimana pemerintah menggunakan teknologi informasi khususnya aplikasi internet berbasis web, untuk menyediakan akses layanan yang mudah terhadap informasi pemerintah dan menyediakan pelayanan publik, juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan, serta melakukan transformasi hubungan antara pejabat publik dengan masyarakat dan juga bisnis. *E-government* dapat dipahami sebagai penggunaan teknologi berdasarkan website, komunikasi internet, dan dalam beberapa hal lainnya *e-government* merupakan aplikasi interkoneksi untuk memfasilitasi komunikasi dan memperluas akses ke dan dari pemberian layanan dan informasi pemerintah lain, baik instansional maupun antar negara. Selain itu juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kinerja dan proses pelaksanaan layanan dan tugas pokok dan fungsinya.

Pembahasan mengenai penerapan *e-government* bukan berarti hanya menerapkan sistem pemerintahan secara elektronik saja atau dengan kata lain otomatisasi sistem, melainkan mempunyai pembahasan yang lebih mendalam daripada itu. Pertama-tama yang harus dilihat adalah bagaimana sistem pemerintahan berjalan, sebelum penerapan *e-government*, karena untuk menjalankan *e-government* diperlukan suatu sistem informasi yang baik, teratur dan sinergi dari masing-masing lembaga pemerintahan, sehingga dari kesemuanya itu bisa didapatkan suatu sistem informasi yang terjalin dengan baik. Karena dengan sistem informasi yang demikian akan memudahkan pemerintah dalam menjalankan fungsinya ke masyarakat. Sedangkan untuk mewujudkan sistem informasi yang baik, teratur dan sinergi antara lembaga pemerintahan, maka sistem informasi dari masing-masing lembaga pemerintahan harus memenuhi suatu standar sistem informasi, dimana standar ini meliputi persyaratan minimal untuk faktor-faktor dari sistem informasi tersebut. Dalam pengertian sistem informasi secara umum, maka unsur-unsur yang terkandung didalamnya adalah manusia, teknologi, prosedur dan organisasi. Kemudian dalam konteks *e-government*, maka kita

akan berbicara mengenai sistem informasi yang berbasis komputer, karena untuk mewujudkan *e-government* tidak ada jalan lain bahwa yang harus dilakukan pertama-tama adalah mengotomatisasi semua unsur yang terdapat dalam sistem informasi dan untuk memperlancar otomatisasi tersebut maka dipergunakanlah teknologi ICT yang dapat mendukung yaitu komputer. Sistem informasi yang berbasis komputer menggunakan komponen-komponen berikut ini seperti data, prosedur, manusia, *software* dan *hardware*. Tetapi sebelum menjalankan sistem informasi yang berbasis komputer, sebelumnya yang harus dibenahi adalah sistem informasi yang bukan berbasis komputer, karena otomatisasi tidak akan mempunyai pengaruh yang signifikan apabila sistem informasi yang bukan berbasis komputernya belum bagus. Tujuan dari penerapan *e-government* yang disarikan dari pemahaman negara-negara asing yang sudah menerapkan konsep ini, adalah mencapai efisiensi, efektifitas dan nilai ekonomis dari praktek layanan pemerintah ke masyarakat. Tetapi tujuan ini sebenarnya memiliki pengertian lebih, dimana yang diharapkan dari penerapan konsep *e-government* adalah restrukturisasi sistem pemerintahan yang sudah ada

agar hasil yang dicapai dengan menerapkan *e-government* bisa maksimal. Hal ini berarti ada masalah sistem kerja, personil, dan budaya kerja yang harus diperhatikan sebelum menerapkan *e-government*. Menurut hasil kajian dari *Harvard JFK School of Government*, untuk mengimplementasikan konsep-konsep digitalisasi dalam sector public, terdapat tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ketiga elemen sukses tersebut adalah *support, capacity dan value* (Indrajit, 2002). Pertama *support*, Elemen *support* adalah elemen yang paling penting dalam mengembangkan *electronic government*. Pengembangan *e-government* memerlukan dukungan atau di sebut juga *political will* dari pemerintah agar konsep *e-government* dapat di terapkan. Tanpa adanya dukungan dari berbagai instansi pembangunan dan pengembangan maka *e-government* tidak dapat di laksanakan. Kedua, *capacity*, maksud dari elemen *capacity* adalah adanya unsur kemampuan ataupun keberdayaan dari pemerintah untuk mewujudkan impian *e-government* menjadi kenyataan. Ketiga, *Value*, elemen pertama dan elemen kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (*supply side*).

Berbagai inisiatif *e-government* tidak akan berguna jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dalam penerapan *e-government* tersebut. Yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dari penerapan *e-government* bukanlah kalangan pemerintah itu sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian mengenai Penerapan *E-government* di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep ini dilaksanakan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model analisis deskriptif. Penelitian ini sangat penting untuk memahami sebuah inovasi berbasis aplikasi digital yang dikembangkan langsung oleh pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, laporan perizinan, maupun pelayanan lainnya dengan hanya mengakses melalui telephone genggam. Sehingga metode pengamatan dan pengambilan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Sugiyono (2013), bahwa penelitian kualitatif mempunyai karakteristik yang lebih menekankan data di balik yang teramati. Data yang di kumpulkan dalam penelitian ini

bersumber dari informan, hasil observasi maupun fakta-fakta yang berkaitan dengan focus penelitian yaitu penggunaan aplikasi di ambil dari kantor Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten pangkep. Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut: (1) Secara aplikatif, data primer ini di kumpulkan oleh peneliti selama proses pengambilan data dengan menggunakan metode wawancara secara mendalam dan observasi terhadap penerapan *e-goverment* balitbangda pangkep. Data primer dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan atau terlibat langsung dalam penerapan aplikasi tersebut. (2) Data sekunder merupakan data-data tertulis atau berupa gambar yang dapat di gunakan sebagai informasi tambahan dalam analisis data primer. Data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari buku-buku referensi, jurnal, dokumentasi, serta laporan-laporan yang berkaitan langsung dengan aplikasi pemerintahan. (3) Dalam melakukan metode penelitian deskriptif kualitatif maka data penelitian ini merupakan data primer yang sumber data penelitian di peroleh secara langsung dari objek penelitian dalam hal ini yaitu wawancara informan yang

dapat memberikan informasi terkait situasi dan kondisi latar belakang penelitian ini. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan beberapa metode antara lain: (1) Dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data dalam bentuk arsip, dokumen, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang mampu mendukung penelitian yang dikemukakan oleh Sugiyono (2015). (2) Wawancara adalah percakapan antara dua orang dengan maksud tertentu dan bersifat mendalam. Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah jenis wawancara terstruktur, dimana peneliti terlebih dahulu menetapkan masalah yang akan dipertanyakan dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di Balitbangda yang berhubungan langsung dengan penerapan *e-government* tersebut. (3) Observasi Menurut Sugiyono (2015:204) observasi adalah kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Observasi yang pertama kali peneliti lakukan adalah cek lokasi penelitian dan memastikan kebenaran adanya penerapan *e-government* di instansi tersebut. Pada penelitian ini peneliti

melakukan observasi sebanyak sebelas kali pertemuan untuk memastikan apakah data-data sebelumnya yang telah diperoleh benar-benar valid atau tidak, serta untuk memperjelas data hasil wawancara sebelumnya dan data tambahan yang mendukung adanya penerapan *e-government* tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota adalah penyelenggara fungsi kelitbangan yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Hasil kelitbangan pemerintahan dalam negeri di pemerintahan daerah menjadi bahan masukan perumusan kebijakan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri serta bahan rekomendasi kepada satuan kerja Unit Eselon I di Kementerian Dalam Negeri dan perangkat daerah di provinsi dan

kabupaten/kota. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) KabupatenPangkajene dan Kepulauan (Pangkep) yang berdiri pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentunya harus mengikuti arahan seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2016. Sebagaimana yang tertuang dalam aturan tersebut bahwa hasil kelitbangan di pemerintahan daerah menjadi bahan perumusan kebijakan dan rekomendasi bagi perangkat daerah di kabupaten/kota. Oleh sebab itu, sudah seharusnya Balitbangda Pangkep mensosialisasikan hasil-hasil kelitbangannya, agar dapat dijadikan bahan rujukan bagi Perangkat Daerah dalam pengambilan kebijakan, serta sebagai alat kontrol bagi kepala daerah, anggota DPRD dan masyarakat terhadap perangkat daerah terkait dengan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari hasil-hasil kelitbangan tersebut. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan hasil observasi dan wawancara dengan informan-informan terpilih yang berhubungan langsung dengan penerapan *e-government* tersebut yang berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan peneliti. Sesuai dengan

tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui *hardware, software, human resources*, data dan informasi, komunikasi, truktur organisasi, dan sikap pelaksana pada penerapan *e-government* di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep dan Kepulauan.

E-government di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep dan Kepulauan merupakan *website* yang dapat digunakan untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi, melakukan aduan/saran maupun penyampaian aspirasi. Agar lebih mengoptimalkan fungsi website di gadget, maka dibuat pula rancangan aplikasinya yang berbasis OS Android. *E-government* yang ada di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep dan Kepulauan adalah suatu wadah yang dipersiapkan oleh pemerintah untuk membangun dan menerapkan teknologi informasi ke dalam sebuah wujud aplikasi dengan tujuan memperbaiki hubungan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dengan memberikan peluang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, juga memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Aplikasi Litbang Pangkep merupakan *e-government* yang bertipe *government-*

to-citizen (G-to-C) adalah untuk mendekatkan antara pemerintah dan masyarakat melalui kanal-kanal akses yang digunakan oleh masyarakat agar dengan mudah menjangkau pemerintah untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari. Dalam meninjau *e-government* Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep, peneliti membedah penerapan *e-government* tersebut menggunakan teori penerapan yang dikemukakan oleh Rianto dan Tri Lestari yang terdiri dari *hardware, software, human resources, data, informasi, komunikasi, struktur organisasi, dan sikap pelaksana*.

Menurut Rianto dan Tri Lestari ada beberapa indikator yang digunakan untuk memaksimalkan penerapan *e-government* di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep, yaitu: *hardware, software, sumber daya manusia, data dan informasi, komunikasi, struktur organisasi, dan sikap pelaksana*.

Sebuah inovasi *e-government* mempunyai keunggulan dalam pelayanan dibandingkan dengan pelayanan sebelumnya. Selalu ada kebaruan yang diciptakan merupakan ciri dari inovasi. Adanya inovasi *e-government* membuat pelayanan jauh lebih efektif dan efisien dari sebelumnya. Pencapaian tujuan pada

penerapan *e-government* di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah kabupaten Pangkep adalah meningkatkan pelayanan informasi dan pengaduan dan menciptakan transparansi antara pemerintah dan masyarakat merupakan proses pengembangan suatu perencanaan dari instansi berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir dari suatu program yang akan dijalankan. Penerapan aplikasi Litbang Pangkep adalah salah satu sarana yang diciptakan oleh pemerintah untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang ia butuhkan melalui aplikasi yang diperuntukkan kepada masyarakat kota pangkep maupun kepada masyarakat yang berada di desa terpencil.

Perangkat Lunak

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diperoleh bahwa *e-government* merupakan inovasi yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep yaitu adanya aplikasi yang berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat agar lebih mudah memperoleh informasi dan melakukan aduan mengenai baik atau kurang baiknya pelayanan oleh satuan kerja perangkat kerja di Badan Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep. Berdasarkan data sekunder dari inovasi *e-government* Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep menunjukkan bahwa sebelum adanya inovasi *e-government* masyarakat harus datang ke kantor untuk mendapatkan informasi dan melaporkan pada satuan kerja perangkat daerah yang ada di Balitbangda. Setelah adanya layanan informasi dan aduan secara online masyarakat dapat melaporkan dan memperoleh informasi kapanpun dan dimanapun mereka berada tanpa harus datang lagi ke kantor.

Perangkat Keras

Terlepas dari *software* penerapan *e-government* juga tidak dapat dipisahkan dari *hardware*. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi tidak bisa terlepas dari kebutuhan sumber daya perangkat keras (*hardware*). Perangkat keras adalah perangkat-perangkat yang digunakan untuk mengoperasikan jalannya *software* aplikasi Litbang Pangkep tersebut. Berdasarkan hasil wawancara mengungkapkan bahwa beberapa *hardware* yang digunakan dalam mengoperasikan jalannya *e-government* di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep adalah

computer, CPU, dan Kabel untuk menghubungkan jaringan dengan computer lainnya, serta *flashdisk* yang digunakan untuk menyimpan data.

Sumber Daya Manusia

Setelah kedua sumber daya terpenuhi maka sumber daya selanjutnya adalah Sumber Daya Manusia. Ketersediaan sumber daya manusia dalam penerapan *e-government* yang dibutuhkan adalah para tenaga spesialis teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi proramme administrator jaringan, operator dan tenaga lainnya. Berdasarkan fakta lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa latar belakang tim teknis pada penerapan *e-government* di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten pangkep tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang seharusnya sumber daya manusia yang ahli dibidang informatika, namun dari hasil wawancara yang telah diperoleh bahwa terlepas dari latar belakang pendidikan sumber daya manusia yang terpilih telah memenuhi kriteria dan mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik serta dibekali dengan pelatihan yang rutin.

Data dan Informasi

Data dan informasi merupakan komponen yang menjadi bahan utama proses *e-government* untuk mendukung tujuan penyebaran informasi. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh bahwa data-data atau informasi yang di sediakan dalam aplikasi tersebut adalah semua jenis kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep, serta hasil-hasil penelitian yang juga dapat diakses dalam aplikasi tersebut. Tentu dengan adanya hasil penelitian yang di upload dalam sebuah aplikasi sangat memudahkan masyarakat terkhusus mahasiswa yang ingin mencari referensi-referensi yang mereka butuhkan.

Komunikasi

Selanjutnya adalah komunikasi dimana Proses komunikasi ini dapat dilakukan dalam bentuk perintah, arahan dan penjelasan melalui forum rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, pelatihan atau bentuk pertemuan lainnya. Tujuannya adalah membangun perspesi yang sama antara pembuat kebijakan dengan pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh bahwa komunikasi yang

dilakukan adalah proses sosialisasi yaitu memperkenalkan kehadiran aplikasi tersebut yang dapat memudahkan masyarakat memperoleh informasi dan melakukan pengaduan. Sosialisasi itu sendiri dilaksanakan dalam setiap agenda yang dilakukan oleh Balitbangda. Pelatihan juga sering kali dilaksanakan guna untuk meningkatkan keterampilan pada setiap SKPD yang berperang dalam penerapan *e-government* tersebut.

KESIMPULAN

Dari beberapa pembahasan dan serangkaian hasil analisis yang telah peneliti lakukan di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Bahwa penerapan *e-government* di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep di ukur dengan beberapa aspek dalam mewujudkan *e-government* dengan menggunakan teori dari Rianto dan Tri Lestari dengan indicator: *hardware, software, human resources, data dan informasi, struktur organisasi, komunikasi, dan sikap pelaksana*. Hal ini dapat dibuktikan dengan terpenuhinya indicator tersebut diatas, saat ini palayanan yang diberikan oleh aparat Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten

Pangkep melalui pelayanan digital tersebut terhenti dikarenakan adanya factor internal dan eksternal yang mempengaruhi aplikasi tersebut sehingga pelayanan informasi, saran dan pengaduan melalui aplikasi untuk sementara tidak lagi dapat diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu aparat harus segera melakukan tindak lanjut untuk menangani masalah aplikasi tersebut agar masyarakat segera mendapatkan kembali pelayanan yang mudah. (2) Bahwa dalam mewujudkan penerapan *e-government* di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep terkendala beberapa factor yang mengakibatkan pelayanan berbasis aplikasi tersebut tidak dapat lagi dijalankan dan digunakan untuk sementara oleh masyarakat. Salah satu factor internalnya adalah hosting pada aplikasi sudah expired karena tidak dilakukan update dan melakukan pembayaran untuk masa perpanjangan penggunaan aplikasi, factor eksternal lainnya adalah tahap sosialisasi yang masih belum maksimal dalam penyampaian informasi tentang hadirnya aplikasi Litbang Pangkep.

REFERENSI

Rahayu, Amyy. (2013). *Manajemen Perubahan dan Inovasi*. Jakarta: UI Press.

- Pramusinto, Agus. (2009). *Governance Reform di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Richardus Eko Indrajit. (2016). *Konsep dan Strategi Electronic*.
- Attahara, Hawa. (2018). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-government: Studi Kasus Aplikasi Ogan Logion Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(1), 66-68.
- Agus, Widodo. (2016). Inovasi e-Health Dinas Kesehatan Surabaya. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 14(14), 151-164.
- Hildo, Nurul. (2014). Strategi Inovasi Layanan dalam Meningkatkan Pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Surabaya. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. Vol 2(1), 4-5.
- Sofianto, A. (2019). Inovasi Manajemen Pemerintahan Berbasis Aplikasi Digital di Provinsi Jawa Tengah. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 3(2), 100-105.
- Noviana, Rina. Dkk. (2012). Manajemen E-government Berbasis Web Model Government to Citizen (G2C) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Public Policy and Management Review*, 4(3).
- Ayyung, Nur. (2019). *Inovasi Program Desa Siaga Kebakaran Lingkungan (D'Sibali) di Kabupaten Gowa* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar).
- Wahida, Nurul. (2016). *Penerapan E-government di Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kabupaten Pinrang* (Skripsi, Universitas Hasanuddin).
- Indrajit, R, E. (2002). *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan*

*Publik Berbasis Teknologi
Digital.* Yogyakarta: Andi.